

Analisis Komparatif Pendekatan Diplomasi Iklim Amerika Serikat dan China di Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Comparative Analysis of the United States and China's Climate Diplomacy Approaches in South Pacific Island Countries

Oleh :

Dahriadi^{1)*}, Riady Ibnu Khaldun²⁾, Rezky Ramadhan Antuli³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat

E-mail: dahriadidahri666@gmail.com

Abstract

Climate change has evolved into a strategic issue that major powers increasingly exploit as a foreign policy instrument, particularly in the South Pacific, a region acutely vulnerable to environmental disruption. This study comparatively analyzes the climate diplomacy approaches of the United States and China toward South Pacific Island Countries, along with the obstacles each nation faces. Employing a qualitative descriptive-comparative method and drawing on secondary sources through library research, the study applies the concepts of foreign policy and climate diplomacy as its analytical framework. Findings indicate that the United States favors multilateral engagement, institutional capacity building, and integration into the global climate regime, whereas China pursues pragmatic bilateral cooperation centered on development assistance, clean energy projects, and South-South solidarity. Rather than reflecting purely environmental commitment, both nations deploy climate diplomacy as a geopolitical tool for expanding influence across this strategically significant region. The study addresses an academic gap concerning great power competition through climate diplomacy in the Pacific.

Keywords: *Climate Diplomacy, Foreign Policy, Geopolitics, South Pacific, Comparative Analysis*

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Isu ini telah berkembang menjadi instrumen strategis yang dimanfaatkan negara-negara besar dalam kebijakan luar negerinya, terutama di kawasan Pasifik Selatan yang sangat rentan terhadap dampak lingkungan. Penelitian ini membandingkan pendekatan diplomasi iklim Amerika Serikat dan China di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi masing-masing. Dengan metode deskriptif-kualitatif komparatif berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan konsep kebijakan luar negeri dan diplomasi iklim sebagai kerangka analisis. Temuan menunjukkan bahwa AS lebih mengedepankan multilateralisme dan penguatan kapasitas kelembagaan, sedangkan China menekankan kerja sama bilateral yang pragmatis melalui bantuan pembangunan dan proyek energi bersih. Keduanya memanfaatkan diplomasi iklim bukan sekadar sebagai komitmen lingkungan, melainkan sebagai instrumen geopolitik di kawasan yang bernilai strategis tinggi.

Kata Kunci: Diplomasi Iklim, Kebijakan Luar Negeri, Geopolitik, Pasifik Selatan, Analisis Komparatif

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan hidup. Isu ini telah bergeser menjadi bagian dari kalkulasi strategis negara-negara besar dalam arena politik internasional. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mencatat bahwa suhu rata-rata global telah meningkat 1,1°C sejak era praindustri—memicu bencana alam yang semakin sering, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem secara masif (Calvin dkk., 2023). Yang menjadi soal, tanggung jawab atas kondisi ini tidaklah merata. Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menegaskan bahwa negara-negara maju menanggung beban historis yang lebih besar atas akumulasi emisi karbon (United Nations, 1992). Ketimpangan inilah yang membentuk lanskap diplomasi iklim kontemporer.

Di tengah perdebatan global ini, kawasan Pasifik Selatan menempati posisi yang unik sekaligus tragis. Negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Tonga, dan Samoa nyaris tidak berkontribusi terhadap emisi

global, namun justru menghadapi ancaman eksistensial paling berat. Kenaikan permukaan laut mengancam keberadaan fisik wilayah mereka. Erosi pesisir merusak infrastruktur. Bencana iklim ekstrem semakin sering menghantam. Kerentanan ini tidak hanya menempatkan kawasan Pasifik sebagai korban utama perubahan iklim, tetapi juga—dan ini yang sering luput dari perhatian—sebagai arena persaingan pengaruh negara-negara besar (Morgan et al., 2024:3).

Dua kekuatan utama yang bermanuver di kawasan ini adalah Amerika Serikat dan China. Pendekatan keduanya terhadap diplomasi iklim di Pasifik Selatan berbeda secara fundamental. AS, terutama di bawah pemerintahan Joe Biden, kembali ke *Paris Agreement* dan menargetkan penurunan emisi 50–52% pada tahun 2030, didukung oleh *Inflation Reduction Act* (IRA) yang mengalokasikan ratusan miliar dolar untuk investasi energi terbarukan (Winters, 2022). China, di pihak lain, bergerak dari posisi defensif yang semula menekankan prinsip CBDR menuju peran kepemimpinan aktif. Beijing membentuk dana bantuan sebesar USD 3,1 miliar untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim dan memperluas kerja sama Selatan–Selatan (Renjie, 2021:400). Kedua pendekatan ini

membawa implikasi geopolitik yang signifikan bagi kawasan Pasifik.

Namun, bagaimana tepatnya kedua negara ini menggunakan diplomasi iklim sebagai alat pengaruh di Pasifik Selatan belum banyak dikaji secara mendalam. Literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek-aspek spesifik: implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDC) oleh negara-negara Pasifik (Nugraha, 2024), kebijakan *Pacific Reset* Selandia Baru (Ananda, 2023), atau dampak perubahan iklim terhadap eksistensi negara kepulauan kecil (Sinaga & Yusril, 2021). Kajian komparatif yang secara langsung menyandingkan pendekatan AS dan China di kawasan ini sebagai bagian dari persaingan *soft power* masih sangat terbatas. Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pendekatan diplomasi iklim AS dan China di negara-negara kawasan Pasifik Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kedua negara dalam pelaksanaannya.

2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini bertolak dari dua konsep utama: kebijakan luar negeri dan diplomasi iklim. Pada level paling dasar, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai perilaku eksternal negara dalam

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
berinteraksi dengan aktor-aktor internasional lainnya. K.J. Holsti menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bukan sekadar dokumen atau pernyataan resmi, melainkan tindakan nyata yang dilakukan negara dalam sistem internasional (Dugis, 2007:114). Pemikiran ini diperdalam oleh James N. Rosenau, yang memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari interaksi antara faktor domestik dan lingkungan internasional. Melalui karyanya *Along the Domestic-Foreign Frontier*, Rosenau menunjukkan bahwa batas antara ranah domestik dan internasional kian kabur, menciptakan turbulensi yang memengaruhi perilaku negara (Rosenau JN, 1997:4). Tiga dimensi utama dalam kebijakan luar negeri—tujuan, strumen, dan perilaku—menjadi kerangka yang berguna untuk membedah bagaimana negara merespons isu yang sama dengan cara yang berbeda (Dehnavi dkk., 2021). Perbandingan antarnegara memungkinkan identifikasi faktor-faktor penentu seperti ideologi pemerintah, kapasitas ekonomi, dan tekanan geopolitik (Wicaksana, 2007:17).

Konsep kedua, diplomasi iklim, merujuk pada upaya negara untuk bernegosiasi dan membangun kesepakatan internasional guna menanggulangi perubahan iklim. Konsep ini tidak berdiri sendiri sebagai isu lingkungan—ia

memadukan dimensi politik, ekonomi, dan strategis. (Harris, 2007) menjelaskan bahwa cara suatu negara menempatkan isu perubahan iklim dalam agenda kebijakan luar negerinya mencerminkan kepentingan yang lebih luas daripada sekadar pelestarian lingkungan. (Bulkeley & Newell, 2010) melengkapi pandangan ini dengan menekankan bahwa diplomasi iklim pada hakikatnya adalah proses negosiasi yang menggabungkan tujuan lingkungan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Sementara (FALKNER, 2016:1120) (FALKNER, 2016:1120) melihat diplomasi iklim sebagai cerminan pertarungan antara tanggung jawab, kapasitas, dan kepentingan negara dalam sistem internasional yang terfragmentasi. Secara operasional, terdapat empat instrumen utama dalam diplomasi iklim: pendanaan iklim, transfer teknologi hijau, penguatan kapasitas, serta dialog kebijakan dan perjanjian internasional (UNFCCC, 2022:8-13).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-komparatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bukan hendak mengukur hubungan kuantitatif, melainkan memahami dan membandingkan strategi diplomasi iklim

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
AS dan China di kawasan Pasifik Selatan secara mendalam (Arfalianda, 2024). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup dokumen kebijakan luar negeri kedua negara, pernyataan resmi pemerintah, laporan organisasi internasional seperti UNFCCC dan *Pacific Islands Forum*, serta artikel jurnal ilmiah dan publikasi media internasional yang kredibel (Saefullah, 2024). Rentang waktu penelitian dibatasi pada periode 2020–2024, yang mencakup dinamika pemerintahan Joe Biden dan Xi Jinping. Lima negara Pasifik Selatan—Fiji, Kiribati, Vanuatu, Tonga, dan Samoa—dipilih berdasarkan tingkat kerentanan iklim yang tinggi serta intensitas keterlibatan AS dan China di masing-masing negara. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, klasifikasi tematik, dan interpretasi komparatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pasifik Selatan terdiri dari puluhan negara kepulauan yang masuk dalam kategori *Small Island Developing States* (SIDS). Sebagian besar wilayahnya hanya terangkat satu hingga dua meter di atas permukaan laut—sebuah ketinggian yang menjadikan ancaman iklim bukan sekadar risiko, melainkan ancaman eksistensial (Reef Resilience Network, 2020). Intrusi air asin, erosi pesisir, dan bencana iklim ekstrem telah

mengganggu ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan keamanan manusia di kawasan ini (Sinaga & Yusril, 2021). Para pemimpin Pasifik sendiri, melalui *Boe Declaration on Regional Security*, secara tegas menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat mereka (Pacific Islands Forum, 2018).

Kondisi kerentanan ini tidak berdiri dalam ruang hampa geopolitik. Justru sebaliknya: ia menciptakan peluang bagi negara-negara besar untuk memperluas pengaruh. AS melihat kawasan Pasifik sebagai bagian integral dari strategi Indo-Pasifik untuk menjaga keseimbangan regional (White House, 2022). China, pada sisi yang lain, memanfaatkan ketergantungan negara-negara Pasifik terhadap bantuan luar negeri untuk membangun jaringan pengaruh melalui kerja sama bilateral dan perjanjian pembangunan (Ministry of Foreign Affairs PRC, 2022). Ketergantungan ini menjadikan negara-negara Pasifik sebagai objek sekaligus subjek dari diplomasi iklim global (Duke, 2025).

Diplomasi iklim AS di Pasifik Selatan dijalankan dalam kerangka kebijakan luar negeri bercorak liberal-internasionalis. Penekanannya terletak pada multilateralisme, tata kelola global berbasis norma, dan penguatan institusi

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
internasional. Melalui *Indo-Pacific Strategy*, AS menempatkan negara-negara Pasifik sebagai mitra strategis dan mengajak Jepang, Australia, serta Selandia Baru dalam inisiatif *Partners in the Blue Pacific* (White House, 2022). Instrumen yang digunakan meliputi bantuan iklim melalui *United States Agency for International Development* (USAID), termasuk program adaptasi seperti *Climate Ready Project* dan *Institutional Strengthening in Pacific Island Countries to Adapt to Climate Change* (ISACC).

Bentuk konkretnya bervariasi di setiap negara mitra. Di Fiji, AS mendukung pengembangan sistem peringatan dini dan pengelolaan hutan melalui *Pacific Islands Forest Restoration Initiative* (PIFRI) (U.S. Department of State, 2022). Di Kiribati, fokusnya pada akses pembiayaan iklim internasional dan ketahanan pesisir (U.S. Department of State, 2022). Pembukaan Kedutaan Besar AS di Nuku'alofa, Tonga, pada 2023 menandai peningkatan keterlibatan diplomatik yang cukup signifikan (U.S. Department of State, 2023). Di Samoa, USAID menjalankan program ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana (U.S. Department of State, 2022), sementara di Vanuatu, bantuan disalurkan melalui mekanisme multilateral untuk pengurangan risiko bencana (U.S.

Department of State, 2020). AS juga aktif dalam dialog multilateral melalui *United States–Pacific Island Country Summit* dan kerja sama keamanan maritim lewat *Operation Blue Pacific*. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan AS lebih berorientasi pada adaptasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kepemimpinan normatif. Kelemahannya: dampak langsung di tingkat komunitas tidak selalu terasa oleh masyarakat Pasifik yang membutuhkan solusi cepat (Global Governance, 2023).

Pendekatan China berbeda secara mendasar. Beijing mengintegrasikan diplomasi iklim ke dalam model kebijakan luar negeri yang pragmatis dan berorientasi pembangunan, dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan. Dokumen *Initiative on Deepening Cooperation with Pacific Island Countries on Combating Climate Change* yang dirilis pada Mei 2025 menegaskan komitmen China untuk memperkuat ketahanan iklim melalui dukungan teknis, keuangan, dan penguatan kapasitas (Ministry of Foreign Affairs PRC, 2025). Perbedaan dengan AS terletak pada sifatnya yang lebih langsung dan terukur.

Di Tonga, China membangun pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari kemitraan strategis komprehensif (Cao Xiaolin, 2020). Di Fiji,

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

dukungan datang dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air melalui hibah pemerintah, ditambah bantuan pascabencana setelah Siklon Winston (Zhang, 2020:1-6). Kerja sama dengan Kiribati dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) mencakup infrastruktur, perdagangan, dan penanganan perubahan iklim (AllBright, 2022). Di Vanuatu, China membingkai keterlibatan infrastrukturnya melalui narasi pembangunan berkelanjutan dan konsep *Green BRI* (Lee, 2022). Di Samoa, kerja sama iklim diposisikan dalam agenda Selatan–Selatan dengan kontribusi terhadap lembaga lingkungan regional (Government of China, 2023). Selain proyek fisik, China juga menjalankan diplomasi pengetahuan: pelatihan dan program peningkatan kapasitas terkait mitigasi, pembangunan rendah karbon, serta pengelolaan bencana (Zhang, 2020). Pendekatan ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *development-oriented climate diplomacy*—strategi yang memadukan kepentingan ekonomi, pengaruh politik, dan agenda lingkungan dalam satu paket.

Ketika kedua pendekatan ini disandingkan, yang tampak adalah dua logika kebijakan luar negeri yang beroperasi pada frekuensi berbeda. AS bekerja dalam kerangka liberal-

internasionalis: penguatan tata kelola global, legitimasi normatif, dan kepemimpinan internasional. China beroperasi dengan logika pragmatis: hasil nyata, kecepatan implementasi, dan manfaat langsung bagi negara mitra. Menggunakan tiga dimensi kebijakan luar negeri (Rosenau JN, 1997) tujuan, instrumen, dan perilaku perbedaan ini menjadi lebih terang. Dari segi tujuan, AS

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
 berorientasi pada pemeliharaan tatanan global, sedangkan China pada perluasan pengaruh ekonomi-politik. Dari segi instrumen, AS mengandalkan forum multilateral dan pendanaan iklim; China mengandalkan kerja sama bilateral dan proyek infrastruktur. Dari segi perilaku, AS cenderung normatif dan institusional; China lebih transaksional dan berorientasi hasil (Wicaksana, 2007).

Tabel 1. Analisis Komparatif Pendekatan Diplomasi Iklim AS dan China di Kawasan Pasifik Selatan

Dimensi	Amerika Serikat	China
Orientasi	Multilateral	Bilateral
Basis Kebijakan	Institusi Global & Norma Internasional	Pembangunan & Kerja Sama Selatan–Selatan
Pendekatan	Normatif-Kelembagaan	Pragmatis-Pembangunan
Instrumen Utama	Pendanaan adaptasi, penguatan kapasitas, integrasi rezim global	Infrastruktur energi bersih, bantuan teknis, proyek BRI
Fokus	Adaptasi iklim & tata kelola	Mitigasi berbasis pembangunan
Tujuan Strategis	Stabilitas regional & kepemimpinan global	Ekspansi pengaruh ekonomi-politik

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertanyaan “siapa yang lebih dominan?” tidak dapat dijawab secara hitam-putih. Jika tolok ukurnya adalah kekuatan institusional dan legitimasi normatif, AS unggul. Namun jika yang diukur adalah visibilitas proyek dan dampak langsung di tingkat komunitas, China tampil lebih menonjol (Heriamsal & Heriamsal, 2025). Ini bukan sekadar perbedaan gaya. Ini

mencerminkan pertarungan dua model diplomasi yang memiliki implikasi mendalam bagi masa depan kawasan.

Studi kasus di kelima negara sasaran memperkuat temuan ini. Di Fiji, AS mendukung tata kelola hutan melalui PIFRI, sementara China memberikan bantuan pascabencana dan membangun infrastruktur energi terbarukan (Acraman, 2024). Di Kiribati, AS memperkuat

perencanaan adaptasi melalui ISACC; China menjalankan kerja sama BRI (AllBright, 2022). Di Vanuatu, bantuan kemanusiaan AS berbeda dengan diplomasi pembangunan China melalui *Green BRI* (Lee, 2022). Di Tonga, AS hadir melalui pembukaan kedutaan besar, China melalui pembangunan infrastruktur tenaga surya (Cao Xiaolin, 2022). Di Samoa, AS fokus pada ketahanan pangan, China pada kerja sama Selatan–Selatan (Government of China, 2023). Pola yang konsisten ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari orientasi strategis yang lebih mendasar.

Tentu saja, tidak ada diplomasi yang berjalan tanpa hambatan. Secara umum, kondisi geografis kawasan—pulau-pulau kecil yang tersebar luas di Samudra Pasifik—menyebabkan akses transportasi terbatas dan biaya logistik tinggi (UNDRR, 2023). Bencana alam yang frekuensinya meningkat juga kerap merusak infrastruktur dan mengganggu keberlanjutan program jangka panjang (Freitas, 2023).

Hambatan spesifik AS bersifat domestik. Kebijakan iklim AS sangat bergantung pada siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Penarikan dari *Paris Agreement* pada era Trump (2017) dan kembalinya pada era Biden (2021)

Vol 21, nomor 1, Juni 2026
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
menunjukkan betapa rapuhnya konsistensi kebijakan iklim AS (Stracqualursi dan Kann, 2021). Polarisasi politik, sistem federalisme yang kompleks, dan pengaruh lobi industri energi fosil memperburuk situasi. Siklus pemilu jangka pendek membuat kebijakan yang membutuhkan komitmen panjang sering kali bukan menjadi prioritas (Rabe & Smith, 2023).

Hambatan China berbeda sifatnya. Di level domestik, Beijing menghadapi kontradiksi antara ketergantungan ekonomi pada batu bara dan komitmen iklim globalnya—sebuah inkonsistensi yang kerap disorot oleh pengamat internasional (Maizland, 2021). Rivalitas geopolitik dengan AS juga membuat isu iklim tidak jarang tersandera oleh ketegangan politik bilateral (Tsafos, 2021). Di level regional, pendekatan bilateral China yang cenderung tidak terintegrasi dengan mekanisme *Pacific Islands Forum* menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan sebagian negara Pasifik. Ditambah lagi, ada kesenjangan antara prioritas China pada mitigasi berbasis pembangunan dengan kebutuhan mendesak negara-negara Pasifik pada adaptasi iklim (Qi & Dauvergne, 2022).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim Amerika Serikat dan

China di kawasan Pasifik Selatan tidak hanya berkaitan dengan komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri kedua negara. Amerika Serikat cenderung menjalankan diplomasi iklim melalui pendekatan multilateral, penguatan kapasitas kelembagaan, pendanaan adaptasi, dan integrasi negara-negara Pasifik ke dalam rezim iklim internasional. Sebaliknya, China lebih menonjolkan pendekatan bilateral yang pragmatis melalui bantuan pembangunan, proyek energi bersih, infrastruktur, dan kerja sama Selatan-Selatan.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki cara yang berbeda dalam membangun pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Amerika Serikat lebih kuat pada aspek legitimasi normatif dan tata kelola global, sedangkan China lebih terlihat melalui proyek konkret yang langsung menyentuh kebutuhan pembangunan negara mitra. Namun, keduanya menghadapi hambatan masing-masing. Amerika Serikat terkendala oleh dinamika politik domestik yang dapat memengaruhi konsistensi kebijakan iklimnya, sementara China menghadapi tantangan kredibilitas karena masih bergantung pada energi fosil dan adanya kecurigaan terhadap motif strategisnya di kawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, negara-negara Pasifik Selatan perlu memperkuat posisi tawar dalam menjalin kerja sama iklim dengan Amerika Serikat maupun China. Bantuan iklim sebaiknya tidak hanya diterima sebagai dukungan pembangunan, tetapi juga perlu diarahkan pada kebutuhan utama kawasan, seperti adaptasi perubahan iklim, perlindungan wilayah pesisir, ketahanan pangan, energi bersih, dan pengurangan risiko bencana. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, negara-negara Pasifik dapat memastikan bahwa kerja sama iklim benar-benar menjawab kepentingan masyarakat lokal, bukan hanya kepentingan strategis negara pemberi bantuan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji respons negara-negara Pasifik Selatan terhadap diplomasi iklim Amerika Serikat dan China. Kajian tersebut penting agar analisis tidak hanya berpusat pada strategi negara besar, tetapi juga melihat bagaimana negara-negara kecil di Pasifik menerima, menilai, menegosiasikan, atau bahkan membatasi pengaruh kedua negara tersebut. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan peran aktor lain seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Uni Eropa untuk memperoleh gambaran yang

DAFTAR PUSTAKA

Acraman. (2024). *China and Kiribati Signed Implementation Plan on Promoting Belt and Road Initiative – Newsletter – AllBright Law Offices*. <https://www.allbrightlaw.com/EN/10531/425ffe0e48185c8c.aspx>

AllBright. (2022). *China to assist Fiji in mitigating climate change – FBC News*. <https://www.fbcnews.com.fj/news/china-to-assist-fiji-in-mitigating-climate-change/>

Arfalianda, F. A. (2024). *DIPLOMASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA – MALAYSIA: UPAYA BERSAMA DALAM MENGATASI ISU – ISU PERUBAHAN IKLIM PERIODE 2019 – 2024*.

Bulkeley, H., & Newell, P. (2010). *Governing Climate Change*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203858295>

Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero, J., Aldunce, P., Barrett, K., Blanco, G., Cheung, W. W. L., Connors, S., Denton, F., Diongue-Niang, A., Dodman, D., Garschagen, M., Geden, O., Hayward, B., Jones, C., ... Ha, M. (2023). *IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]*. IPCC, Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>

Cao Xiaolin. (2022). *Embassy News Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Tonga*. <https://to.china->

Dehnavi, H. H., Rahbar, A., Bakhshi, A., & Mohammadzadeh, A. (2021). The Study of James Rosenau's Affiliation Theory with an Emphasis on the Role of Individual and International System Variables in the Analysis of Regionalism in the Second Pahlavi and Islamic Republic of Iran. *Propósitos y Representaciones*, 9(SPE2). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE2.958>

Duke. (2025). *Pacific Aid Map: 2025 Key Findings - Lowy Institute Pacific Aid Map*. <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/analysis/2025/key-findings/>

FALKNER, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>

Freitas. (2023). *Environmental challenges of the Pacific Islands | Environmental Sciences | Research Starters | EBSCO Research*. <https://www.ebsco.com/research-starters/environmental-sciences/environmental-challenges-pacific-islands>

Global Governance. (2023). *US Diplomacy and the Pacific Islands: Risk of Over-Promising and Under-Delivering | Georgetown Journal of International Affairs | Georgetown University*. <https://gjia.georgetown.edu/global-governance/u-s-diplomacy-and-the-pacific-islands-risk-of-over-promising-and-under-delivering/>

Government of China. (2023). *Samoa – China Relationship – Samoa Embassy*. <https://www.samoaembassy.cn/samoa-china-relationship/>

Harris. (2007). *Europe and Global Climate Change*. Edward Elgar Publishing.

Heriamsal, K., & Heriamsal, K. (2025). *Pergeseran Diplomasia Tiongkok Dalam Wacana Perubahan Iklim di Kepulauan Pasifik*.

Lee. (2022). *Experts see environmental risk from China's small island BRI efforts – Climate Tracker Asia*. <https://climatetracker.asia/experts-see-environmental-risk-from-chinas-small-island-bri-efforts/>

Maizland. (2021). *China's Fight Against Climate Change and Environmental Degradation | Council on Foreign Relations*.

<https://www.cfr.org/backgrounders/china-climate-change-policies-environmental-degradation>

Ministry of Foreign Affairs PRC. (2022). *China's Position Paper on Mutual Respect and Common Development with Pacific Island Countries* Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.

https://www.mfa.gov.cn/eng/wjzbzd/202205/t20220531_10694923.html

Morgan, W., Carter, S. G., & Manoa, F. (2024). Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy. *The Journal of Pacific History*, 59(3), 353–374. <https://doi.org/10.1080/00223344.2024.2360093>

Nugraha, R. and A. B. and H. R. (2024). *Prototipe Mesin Batik Tulis CNC dengan Canting Tembakan Prototype of CNC Batik Tulis Machine with Canting Tembakan - repo unpas*. <https://repository.unpas.ac.id/70754/>

Pacific Islands Forum. (2018). *Boe Declaration on Regional Security | Pacific Islands Forum Secretariat*. <https://forumsec.org/publications/boe-declaration-regional-security>

Qi, J. J., & Dauvergne, P. (2022). China's rising influence on climate governance: Forging a path for the global South. *Global Environmental*

Rabe, B., & Smith, H. (2023). Climate Governance and Federalism in the United States. Dalam *Climate Governance and Federalism* (hlm. 306–327). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781009249676.016>

Reef Resilience Network. (2020). *Pasifik Selatan – Pemulihan | Jaringan Ketahanan Terumbu Karang*. <https://reefresilience.org/id/case-studies/south-pacific-restoration/>

Renjie, F. (2021). The Making of China's Climate Diplomacy: Analysis from the Perspective of Two-Level Games. *China Report*, 57(4), 398–416. <https://doi.org/10.1177/00094455211047067>

Rosenau JN. (1997). *Organizations*. In: *Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World*. Cambridge Studies in International Relations.

Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>

Sinaga, M., & Yusril, Y. (2021). Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan: Ancaman Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Eksistensi Negara dan Penduduk Kiribati. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1672>

Stracqualursi dan Kann. (2021). *US officially rejoins the Paris climate accord | CNN Politics*. <https://edition.cnn.com/2021/02/19/politics/us-rejoins-paris-agreement-biden-administration>



fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id

ejournalwiraraja.com

Tsafos, N. (2021). *Engaging China on Climate before COP26*.

UNDRR. (2023). *USAID climate risk analysis for Pacific Island countries: Assessment report | PreventionWeb*. <https://www.preventionweb.net/publication/usaids-climate-risk-analysis-pacific-island-countries-assessment-report>

UNFCCC. (2022). *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*.

United Nations. (1992). *UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE UNITED NATIONS*.

Vol 21, nomor 1, Juni 2026

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Wicaksana, I. G. W. (2007). *“A Guide To Theory”*: *Epistemologi Politik Luar Negeri*.

Winters. (2022). *Biden signs the Inflation Reduction Act into law | Grist*. <https://grist.org/politics/biden-signs-the-inflation-reduction-act-into-law/>

Zhang, D. (2020). “Assessing China’s Climate Change Aid to the Pacific.” In Brief No. 2020/3. Australian National University, hal. 1–6. *Sistem Informasi dan Komputer*, 09, 97–101.

<https://doi.org/10.32736/sisfokom.v9.i1.770>